

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI TAHUN 2024**

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuat atau penerbit informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
						Cetak	Softcopy	
1	Dokumen Rencana Strategis (Renstra)	Memuat tentang Rencana Strategis (Renstra) dinas kelautan dan perikanan	Sekretariat	Fungsional Perencana	2024	√	√	Aktif
2	Dokumen Rencana Kerja (Renja)	Memuat tentang Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Renstra	Sekretariat	Fungsional Perencana	Tahunan	√	√	Aktif
3	Dokumen Rencana Kerja (Renja)	Memuat tentang Rencana Kerja tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Renstra	Sekretariat	Fungsional Perencana	Tahunan	√	√	Aktif
4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Memuat tentang pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023	Sekretariat	Fungsional Perencana	Tahunan	√	√	Aktif
5	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Memuat tentang capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan	Sekretariat	Fungsional Perencana	Setiap Bulan	√	√	Aktif
6	Dokumen SAKIP	Memuat tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022	Sekretariat	Fungsional Perencana	Tahunan		√	Aktif



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



7	Neraca, CALK, & LRA	Memuat tentang informasi keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan yang telah di audit	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Keuangan	2023		√	Aktif
8	Peta Jabatan Tahun dan Kepegawaian Tahun 2024	Memuat tentang daftar informasi pejabat dan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024	Sekretariat	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2024		√	Aktif
9	Dokumen Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Buleleng Provinsi Bali	Memuat informasi tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wlayah Buleleng Provinsi Bali	Bidang Kelautan	Sub Koordinator Unit Substansi Tata Ruang Laut	2023		√	Aktif
10	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 123 Tahun 2023 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Karangasem Provinsi Bali	Memuat informasi tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wlayah Karangasem Provinsi Bali	Bidang Kelautan	Sub Koordinator Unit Substansi Tata Ruang Laut	2023		√	Aktif
11	Standar Operasional Prosedur Proses Penerbitan SIUP, SIPI, SIKPI, SIPI ANDON, Buku Kapal, Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan	Memuat tentang alur/tata cara proses penerbitan SIUP, SIPI, SIKPI, SIPI ANDON, Buku Kapal, Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan	Bidang Perikanan	Sub Koordinator Unit Substansi Perikanan Tangkap	2020		√	Aktif
12	Standar Operasional Prosedur Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan menggunakan Aplikasi SKP Online	Memuat tentang mekanisme penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan menggunakan aplikasi SKP Online	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembina Mutu	2021		√	Aktif
13	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 17/PERMEN-KP/2019	Memuat Persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan Kemneterian Kelautan dan Perikanan RI	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	2019		√	Aktif
14	Standar Operasional Prosedur Inspeksi Lapangan Insidental Pengawasan Ruang Laut	Memuat tentang alur penanganan aduan masyarakat yang diterima dari pelapor terkait indikasi pelanggaran aturan pemanfaatan ruang laut di Provinsi Bali hingga pada penyampaian kembali hasil tindak lanjut laporan/pengaduan kepada pihak pelapor	Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sub Koordinator Unit Substansi Pengawasan Sumber Daya Kelautan	2022		√	Aktif
15	Standar Pelayanan pada UPTD Pelabuhan Perikanan	Memuat tentang pedoman mekanisme dan prosedur pelayanan Jasa Pemanfaatan Lahan dan Bangunan, Pelayanan Tambat Labuh	UPTD. Pelabuhan Perikanan	Kepala Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	2023	√	√	Aktif
16	Standar Operasional Prosedur Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya	Memuat tentang pedomandalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya yang terdapat pada kawasan konservasi	UPTD. Kawasan Konsevasi Perairan Provinsi Bali	Kepala Seksi Pengawasan dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Konservasi Perairan	2019		√	Aktif



17	Standar Operasional Prosedur Sosialisasi/Penyadartahuan Masyarakat	Memuat tentang pedoman dalam pelaksanaan sosialisasi/penyadartahuan masyarakat pada kawasan konservasi	UPTD. Kawasan Konsevasi Perairan Provinsi Bali	Kepala Seksi Pengawasan dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Konservasi Perairan	2019		√	Aktif
18	Standar Operasional Prosedur Mekanisme Pelaporan	Memuat tentang pedoman dalam kegiatan pelaporan oleh masyarakat terkait kejadian atau pelanggaran di kawasan konservasi	UPTD. Kawasan Konsevasi Perairan Provinsi Bali	Kepala Seksi Pengawasan dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Konservasi Perairan	2019		√	Aktif
19	Standar Operasional Prosedur Pemantauan Sumberdaya	Memuat tentang pedoman dalam pelaksanaan pemantauan sumberdaya pada kawasan konservasi	UPTD. Kawasan Konsevasi Perairan Provinsi Bali	Kepala Seksi Potensi, Konservasi dan Rehabilitasi Kawasan Konservasi Perairan Bali	2019		√	Aktif
20	Standar Operasional Prosedur Retribusi Penerbitan Karcis Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk Kegiatan Pariwisata Alam Perairan	Memuat tentang pedoman dalam retribusi penerbitan karcis masuk untuk kegiatan pariwisata alam pada kawasan konservasi	UPTD. Kawasan Konsevasi Perairan Provinsi Bali	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	2022	√	√	Aktif
21	Standar Operasional Prosedur Retribusi Penerbitan Karcis Masuk/Tanda Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk Kegiatan Penelitian	Memuat tentang pedoman dalam retribusi penerbitan karcis masuk/tanda masuk untuk kegiatan penelitian pada kawasan konservasi	UPTD. Kawasan Konsevasi Perairan Provinsi Bali	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	2022	√	√	Aktif
22	Standar Operasional Prosedur Retribusi Kegiatan Foto dalam Kawasan Konservasi Perairan	Memuat tentang pedoman dalam retribusi kegiatan foto yang berada dalam kawasan konservasi	UPTD. Kawasan Konsevasi Perairan Provinsi Bali	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	2022	√	√	Aktif
23	Standar Operasional Prosedur Retribusi Kegiatan Shooting Film/Dokumenter dalam Kawasan Konservasi Perairan	Memuat tentang pedoman dalam retribusi mengenai kegiatan shooting film/dokumenter yang berada dalam kawasan konservasi	UPTD. Kawasan Konsevasi Perairan Provinsi Bali	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	2022	√	√	Aktif
24	Standar Operasional Prosedur Pengujian Mutu Hasil Perikanan	berisi informasi tentang alur proses layanan mutu pengujian dari sample yang diterima sampai keluar laporan hasil uji	UPTD. Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Provinsi Bali	Kepala Seksi Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Provinsi Bali	2018		√	Aktif
25	Standar Operasional Prosedur Penerimaan Retribusi Jasa Usaha dari Layanan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Berisi alur proses penerimaan retribusi dari pelanggan hingga akhir diterima oleh pihak Bank	UPTD. Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Provinsi	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha	2018		√	Aktif
26	Standar Operasional Prosedur Seksi Penerapan	Berisi informasi tata cara penerbitan sertifikat kesesuaian dan tata cara penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI	UPTD. Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Provinsi Bali	Kepala Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan	2021		√	Aktif



27	Sistem Terintegrasi ISO 17025: 2017, ISO 17065: 2012, ISO 9001: 2015	Berisi informasi tentang uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam pelaksanaan dokumen sistem terintegrasi ISO 17025: 2017, ISO 17065: 2012, ISO 9001: 2015	UPTD. Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Provinsi Bali	Kepala UPTD. Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	2021	√	√	Aktif
28	Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada UPTD. Produksi Budidaya Air Payau/Laut	Berisi informasi tentang alur proses pelayanan pembelian benih, calon induk/induk, ikan konsumsi	UPTD. Produksi Perikanan Budidaya	Kepala Seksi Produksi Budidaya Air Payau/Laut dan Kepala Seksi Produksi Budidaya Air Tawar	2022		√	Aktif
29	Petunjuk Teknis Budidaya Udang Vaname di Kolam Bundar	Berisi informasi tentang cara budidaya Udang Vaname yang baik di kolam bundar	UPTD. Produksi Perikanan Budidaya	Kepala Seksi Produksi Budidaya Air Payau/Laut	2022		√	Aktif
30	Petunjuk Teknis Budidaya Udang Vaname	Berisi informasi tentang cara budidaya Udang Vaname yang baik di tambak	UPTD. Produksi Perikanan Budidaya	Kepala Seksi Produksi Budidaya Air Payau/Laut	2022		√	Aktif
31	Standar Operasional Prosedur Pembenihan Udang Galah	Berisi informasi tentang cara pembenihan Udang Galah yang baik	UPTD. Produksi Perikanan Budidaya	Kepala Seksi Produksi Budidaya Air Payau/Laut	2022		√	Aktif
32	Standar Operasional Prosedur Pembenihan Ikan Nila	Berisi informasi tentang cara pembenihan ikan yang baik	UPTD. Produksi Perikanan Budidaya	Kepala Seksi Produksi Budidaya Air Tawar	2022		√	Aktif
33	Standar Operasional Prosedur Kegiatan Rutin Sub. Bagian Tata Usaha	Berisi informasi tentang pelaksanaan kegiatan rutin pada sub. bagian tata usaha	UPTD. Produksi Perikanan Budidaya	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha	2022		√	Aktif
34	Standar Ooperasional Prosedur Penerimaan Retribusi Jasa Usaha dari Layanan Penjualan Benih/Bibit dan Udang	Berisi alur proses penerimaan retribusi dari pelanggan hingga akhir diterima oleh pihak Bank	UPTD. Produksi Perikanan Budidaya	Kepala Seksi Produksi Budidaya Air Payau/Laut	2022		√	Aktif

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
Ir. Putu Sumardiana, MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670714 199403 1 003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI TAHUN 2024**

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan	
1	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali	Memorandum dan Disposisi Pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf I dan pasal 6 ayat 3.d informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Menghambat Proses Pengambilan Keputusan/Kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	Tidak Terbatas
2	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali	Nota Dinas	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf I dan pasal 6 ayat 3.d informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Menghambat Proses Penyusunan/Menghambat Pengambilan Kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	Tidak Terbatas



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



3	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali	Semua Data, Surat-Surat, Laporan, Penelitian, dan Dokumen Lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau di dokumentasikan	- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf I dan pasal 6 ayat 3.d informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat Proses Penyusunan/Menghambat Pengambilan Kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	Tidak Terbatas
4	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali	Arsip/Dokumen Nota Dinas, Memo Pimpinan yang dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	- UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf I dan pasal 6 ayat 3.d informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat Proses Penyusunan/Menghambat Pengambilan Kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	Tidak Terbatas
5	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali	Data Kesehatan, Keluarga, Rekening, Tabungan, Pinjaman Pegawai, Hak Kekayaan Pribadi yang menurut peraturan tidak wajib untuk dibuka atau yang belum diverifikasi KPK untuk dibuka	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat 3.c informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	Tidak Terbatas



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



6	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali	Identitas Informan, Pelaporan, dan/atau saksi, yang mengetahui adanya indikasi pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a informasi yang menghambat proses penegakan hukum	Menghambat proses penegakan hukum	Mengamankan proses penegakan hukum	Tidak Terbatas
7	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali	Data Retribusi penjualan benih udang galah dan vaname pemenuhan retribusi PAD	- UU KIP No. 14 Tahun 2008 - Perda No 3 Tahun 2018	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
Ir. Putu Sumardiana, MP
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19670714 199403 1 003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

